BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kawin lari (*Lahi Kawin*) dimulakan dengan kesepakatan antara si bujang dan si gadis yang ingin melaksanakan perkawinan dimana pada tata pelaksanaannya tidak terdapat campur tangan antara orang tua si bujang dan si gadis, lalu dengan kehendak sendiri si bujang menjemput si gadis di rumah atau kediaman orang tuanya pada malam hari menuju kerumah salah seorang kerabat si gadis serta didamping oleh salah seorang kerabat si gadis. Ketika si bujang telah mengantarkan si gadis ke rumah kerabatnya (*meman*) si bujang menyampaikan kepada kerabat si gadis (*meman*) bahwasannya dia telah membawa lari si gadis tersebut dengan maksud ingin mengawininya.
2. Penyebab terjadinya kawin lari (*Lahi Kawin*) ada empat, diantaranya: pertama, keluarga pihak perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan anaknya karena telah mempunyai jodoh tersendiri untuk anak tersebut. Kedua, orang tua pihak (laki-laki/ perempuan) menolak lamaran dari pihak laki-laki maupun perempuan. Ketiga, adanya tradisi menikahkan anak kementerian diantara pihak kerabat. Keempat, strata sosial yang tidak berimbang antara pihak yang ingin menikah.” Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana perkawinan tersebut haruslah dilakukan oleh individu yang telah cukup

umur dan dicatatkan agar negara hadir dalam melindungi hak para pasangan yang melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapat dari wawancara, bagi para pelaku *lahi kawin* yaitu Tomy, Fadly dan Ramoini, jika mereka tidak melaksanakan prosesi pernikahan, maka disini letak berlakunya hukum adat, mereka wajib membayar denda berupa 1 ekor kambing dan beras 20 gantang. Sesuai seloko adat "*kalaulah ninggah umah agak setapak, tinggal bendullah selangkah, namun tango la sejenjang, tibo di papannya bedetak*" (Jika sudah satu langkah meninggalkan rumah, juga melewati pelataran rumah, hingga melewati tangga, maka pelanggaran adat telah dilakukan.)

Dalam penelitian ini para responden yang melakukan *lahi kawin* tidak dikenakan denda adat dikarenakan mereka setelah *lahi kawin* melangsungkan pernikahan namun mereka memperoleh sanksi sosial.

B. Saran

Dalam kesempatan ini saya selaku penulis dapat memberikan saran-saran yang kiranya dapat menjadi jalan tengah dari permasalahan kawin lari pada masyarakat adat Rantau Panjang Kecamatan Tabir, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat adat desa Rantau Panjang tidak lagi membagi-bagi masyarakat atau melestarikan perjodohan diantara anak kemenakan karena sejatinya pernikahan tersebut ialah harus didasarkan oleh cinta tanpa ada paksaan dari pihak manapun, ditengah kemajuan teknologi dan modernisasi generasi muda tentu memiliki cakrawala berfikir dan

koneksi yang lebih luas tak terkecuali dalam menemukan pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria mereka.

2. Para sesepuh adat hendaknya mampu mencari jalan terbaik agar tidak terjadinya perkawinan lari terhadap pasangan yang belum cukup umur menurut uu perkawinan.
3. KUA kecamatan tabir dan perangkat kelurahan harus melaksanakan pencatatan dengan inisiatif dan bersinergi untuk menjadi bahan evaluasi oleh instansi terkait agar praktek kawin lari ini tidak lagi marak dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur pada masyarakat adat Rantau Panjang.